



**KURIKULUM YANG BERUBAH-UBAH:
MENILAI DAMPAK DAN TANTANGAN PERUBAHAN KURIKULUM DI
INDONESIA DALAM PERBANDINGAN DENGAN NEGARA MAJU**

Yulianto

Kementrian Agama

abcyulianto@gmail.com

Abstract: *Curriculum changes in Indonesia often have significant impacts on the stability and quality of education. This article compares curriculum policies in Indonesia with developed countries such as Finland, Japan, and Singapore, which apply a research-based approach and long-term evaluation in designing curriculum changes. These countries tend to adopt changes gradually by involving stakeholders to ensure the relevance of the curriculum to the needs of the times and the world of work. In contrast, curriculum changes in Indonesia are often carried out without being based on valid data or in-depth research, causing confusion among teachers and students and hindering the achievement of skills relevant to the labor market. This article recommends the need for in-depth evaluation of curriculum policies, inclusive involvement of stakeholders, adequate teacher training, and an evidence-based approach to improve the relevance and effectiveness of the national curriculum. By reducing political influence in education policy, Indonesia can design a curriculum that is more stable and in line with global demands.*

Keywords: *curriculum change, education, research-based approach, education policy, Indonesia*

Abstrak: Perubahan kurikulum di Indonesia sering kali menimbulkan dampak signifikan terhadap stabilitas dan kualitas pendidikan. Artikel ini membandingkan kebijakan kurikulum di Indonesia dengan negara-negara maju seperti Finlandia, Jepang, dan Singapura, yang menerapkan pendekatan berbasis riset dan evaluasi jangka panjang dalam perancangan perubahan kurikulum. Negara-negara tersebut cenderung mengadopsi perubahan secara bertahap dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk memastikan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan zaman dan dunia kerja. Sebaliknya, perubahan kurikulum di Indonesia kerap dilakukan tanpa didasari data yang valid atau riset mendalam, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan guru dan siswa serta menghambat pencapaian keterampilan yang relevan dengan pasar kerja. Artikel ini merekomendasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan kurikulum, pelibatan inklusif para pemangku kepentingan, pelatihan guru yang memadai, dan pendekatan berbasis bukti untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas kurikulum nasional. Dengan mengurangi pengaruh politik dalam kebijakan pendidikan, Indonesia dapat merancang

kurikulum yang lebih stabil dan sesuai dengan tuntutan global.

Kata perubahan kurikulum, pendidikan, pendekatan berbasis riset, kebijakan
Kunci: pendidikan, Indonesia

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Salah satu isu yang sering mendapat perhatian adalah kebijakan perubahan kurikulum yang hampir selalu terjadi setiap kali terjadi pergantian Menteri Pendidikan. Meskipun perubahan ini sering dianggap sebagai respons terhadap dinamika pendidikan, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap kualitas pendidikan dalam jangka panjang.

Jika kita bandingkan dengan negara-negara maju seperti Finlandia, Singapura, dan Jepang, perubahan kurikulum di negara-negara tersebut cenderung lebih terencana dan stabil. Kebijakan mereka didasarkan pada riset mendalam serta evaluasi yang komprehensif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perubahan kurikulum di negara-negara ini lebih jarang terjadi dan lebih berfokus pada penyesuaian atau pembaruan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan global yang berkembang.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena seringnya perubahan kurikulum di Indonesia dan membandingkannya dengan praktik di negara-negara maju. Melalui perbandingan ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia, serta solusi yang lebih berkelanjutan untuk perbaikan sistem pendidikan di Indonesia.

1. Seringnya Perubahan Kurikulum di Indonesia?

Seringnya perubahan kurikulum di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama yang terkait dengan kebijakan pendidikan yang tidak selalu terencana dan berbasis data yang matang. Salah satu faktor utama adalah perubahan kepemimpinan di tingkat kementerian pendidikan. Setiap kali ada pergantian Menteri Pendidikan, sering kali diikuti oleh keinginan untuk memperkenalkan perubahan besar dalam kurikulum sebagai bagian dari visi dan

misi baru pemerintahan. Kebijakan kurikulum sering kali dijadikan alat untuk mengimplementasikan pandangan atau program pendidikan baru yang dianggap lebih sesuai dengan perkembangan zaman atau untuk mengatasi masalah yang ada pada kurikulum sebelumnya.

Selain itu, ketidakstabilan kebijakan pendidikan dan keinginan untuk "membuktikan perubahan" juga menjadi faktor penting. Perubahan kurikulum sering kali dianggap sebagai cara cepat untuk memperbaiki kualitas pendidikan tanpa adanya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kurikulum yang ada. Seringnya perubahan ini tidak didasarkan pada kajian yang mendalam atau riset yang memadai tentang dampak jangka panjang, namun lebih pada keputusan administratif yang bisa berubah sesuai dengan kepentingan politik.

2. Apa dampak dari perubahan yang terlalu sering bagi guru, siswa, dan sistem pendidikan secara keseluruhan?

Dampak dari perubahan kurikulum yang sering dapat sangat merugikan bagi banyak pihak dalam sistem pendidikan.

- **Bagi guru**, mereka sering kali menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan kurikulum yang terus-menerus. Proses transisi ini membutuhkan pelatihan ulang dan waktu yang cukup untuk mempersiapkan materi ajar baru, namun sering kali tidak disertai dengan dukungan pelatihan yang memadai. Hal ini dapat mengganggu efektivitas pengajaran dan meningkatkan beban kerja guru.
- **Bagi siswa**, seringkali perubahan kurikulum dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pembelajaran. Siswa mungkin tidak mendapatkan pemahaman yang mendalam karena materi yang dipelajari bisa saja terganti atau disesuaikan dengan kurikulum yang baru, yang mengakibatkan ketidakteraturan dalam pembelajaran mereka. Ini berpotensi menghambat pencapaian kompetensi dasar yang seharusnya mereka kuasai.
- **Bagi sistem pendidikan secara keseluruhan**, perubahan yang sering menyebabkan sistem pendidikan menjadi kurang stabil dan terfragmentasi.

Alokasi anggaran yang dialokasikan untuk mendukung perubahan kurikulum yang berkelanjutan sering kali lebih besar daripada investasi dalam peningkatan kualitas pengajaran atau infrastruktur pendidikan. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengembangan pendidikan itu sendiri.

3. Apa faktor politik, sosial, dan budaya yang mendorong terjadinya perubahan kurikulum?

Faktor politik, sosial, dan budaya sangat memengaruhi kebijakan perubahan kurikulum di Indonesia.

- **Faktor Politik:** Pergantian pemerintahan yang sering diikuti dengan pergantian Menteri Pendidikan mempengaruhi arah kebijakan pendidikan, termasuk kurikulum. Menteri Pendidikan yang baru sering kali ingin menunjukkan identitas atau visi kebijakan yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya melalui pembaruan kurikulum. Kurikulum menjadi sarana politik untuk memperkenalkan ide-ide baru dalam pendidikan.
- **Faktor Sosial:** Perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang berkembang pesat, terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perkembangan teknologi, memengaruhi kebutuhan pendidikan. Misalnya, peningkatan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, perubahan dalam dunia kerja yang membutuhkan keterampilan baru, dan tuntutan untuk mencetak generasi yang siap bersaing di tingkat global mendorong perubahan kurikulum agar lebih relevan.
- **Faktor Budaya:** Di Indonesia, aspek budaya lokal dan nilai-nilai nasional juga memainkan peran penting dalam pembentukan kurikulum. Terdapat keinginan untuk menjaga dan memperkuat identitas budaya bangsa dalam kurikulum, sekaligus mencocokkan kurikulum dengan standar internasional. Ketegangan antara mempertahankan nilai-nilai lokal dan mengikuti tren pendidikan global sering kali mendorong perubahan kurikulum.

Seringnya perubahan kurikulum di Indonesia dapat dijelaskan oleh faktor politik, sosial, dan budaya yang memengaruhi kebijakan pendidikan. Dampaknya sangat terasa bagi guru, siswa, dan sistem pendidikan secara keseluruhan, yang sering kali terjebak dalam dinamika perubahan yang tidak terencana dengan matang. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan pendidikan untuk lebih fokus pada evaluasi berkelanjutan dan perencanaan yang berbasis data, guna menciptakan kurikulum yang stabil dan efektif dalam jangka panjang.

PENDEKATAN KURIKULUM DI INDONESIA

Pendekatan yang dilakukan di Indonesia dalam mengelola kurikulumnya mencerminkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang di negara ini. Berikut adalah penjelasan mengenai pendekatan tersebut:

1. Sentralisasi dalam Perumusan Kebijakan

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pendidikan memiliki kewenangan utama dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum. Model ini memastikan keseragaman kebijakan secara nasional, meskipun sering kali mengurangi fleksibilitas di tingkat lokal. Sentralisasi ini memungkinkan pemerintah untuk dengan cepat merespons perubahan kebijakan, tetapi sering menghasilkan keputusan yang kurang mempertimbangkan kebutuhan daerah.

2. Pendekatan Reaktif

Kebijakan kurikulum di Indonesia sering kali bersifat reaktif, merespons isu-isu tertentu seperti perubahan politik, tekanan internasional, atau kebutuhan pasar kerja. Misalnya, perubahan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ke Kurikulum 2013 (K-13) hingga Kurikulum Merdeka mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan zaman. Namun, kurangnya evaluasi jangka panjang sebelum implementasi sering kali menyebabkan ketidaksiapan di lapangan.

3. Eksperimen dan Inovasi Terbatas

Pendekatan terkini, seperti **Kurikulum Merdeka**, mencoba mengadopsi fleksibilitas yang lebih besar melalui pembelajaran berbasis proyek dan penguatan

karakter. Namun, inovasi ini masih terhambat oleh tantangan implementasi, seperti:

- Keterbatasan pelatihan guru.
- Kurangnya fasilitas memadai di sekolah tertentu.
- Kesenjangan kemampuan antara daerah maju dan daerah tertinggal.

4. Pelibatan Pemangku Kepentingan

Dalam beberapa tahun terakhir, ada upaya untuk melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, seperti guru, akademisi, dan organisasi pendidikan, dalam perumusan kebijakan kurikulum. Namun, tingkat keterlibatan ini masih perlu diperluas agar kebijakan lebih inklusif dan relevan.

5. Konteks Global dan Lokal

Indonesia mengadopsi pendekatan yang berupaya menyeimbangkan kebutuhan global dan lokal. Misalnya:

- Mengintegrasikan **kecakapan abad ke-21** (critical thinking, creativity, collaboration, communication) dalam pembelajaran.
- Memperhatikan nilai-nilai budaya lokal dan penguatan **Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil'alam** sebagai fondasi karakter siswa.

Tantangan yang Dihadapi

- **Ketergantungan pada pendekatan politik:** Pergantian kebijakan pendidikan sering kali dipengaruhi oleh perubahan kepemimpinan politik.
- **Ketidaksiapan infrastruktur:** Tidak semua sekolah mampu mengimplementasikan pendekatan baru akibat keterbatasan sumber daya.
- **Kurangnya evaluasi jangka panjang:** Perubahan kurikulum sering kali dilakukan tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan sebelumnya.

Pendekatan Kurikulum di Negara Maju

1. Bagaimana negara-negara seperti Finlandia, Jepang, dan Singapura mengelola kurikulum mereka?

Negara-negara maju seperti Finlandia, Jepang, dan Singapura dikenal dengan pendekatan yang terstruktur, stabil, dan berbasis riset dalam mengelola

kurikulum mereka. Masing-masing negara ini memiliki cara unik untuk mengelola kurikulum yang berfokus pada pengembangan kualitas pendidikan yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan global.

- **Finlandia:**

Finlandia dikenal dengan sistem pendidikan yang sangat dihargai di dunia. Kurikulum di Finlandia cenderung stabil dan berbasis pada kepercayaan terhadap profesionalisme guru. Pemerintah Finlandia memberikan otonomi yang besar kepada sekolah dan guru dalam merancang dan menerapkan kurikulum, meskipun ada standar nasional yang jelas untuk kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Pendekatan Finlandia sangat berfokus pada pendidikan holistik, yang tidak hanya mengutamakan hasil akademis, tetapi juga pengembangan karakter dan keterampilan sosial. Kurikulum mereka dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi. Pemerintah Finlandia hanya melakukan revisi kurikulum setelah evaluasi yang sangat teliti dan berdasarkan riset yang mendalam.

- **Jepang:**

Kurikulum Jepang lebih terpusat di tingkat nasional, dengan pedoman yang sangat jelas dan diterapkan secara konsisten di seluruh sekolah. Jepang menekankan pentingnya pendidikan karakter dan nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, dan rasa tanggung jawab. Kurikulum mereka tidak hanya fokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter moral siswa. Kurikulum Jepang seringkali berbasis pada pendekatan keterampilan dan kompetensi, yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan dengan kehidupan nyata dan dunia kerja. Perubahan kurikulum di Jepang biasanya dilakukan setelah kajian yang mendalam dan berkala, dan lebih banyak menekankan penyesuaian daripada perubahan besar-besaran.

- **Singapura:**

Kurikulum di Singapura adalah salah satu yang paling terstruktur dan berorientasi pada hasil di dunia. Pemerintah Singapura secara aktif mengelola kurikulum untuk memastikan bahwa siswa dilatih dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar global, dengan fokus pada kemampuan kognitif dan keterampilan abad 21. Singapura memiliki sistem evaluasi yang ketat dan berbasis data untuk mengukur efektivitas kurikulum dan memastikan bahwa kurikulum terus disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan global. Kurikulum di Singapura juga memiliki fleksibilitas, memungkinkan adanya penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan teknologi. Perubahan kurikulum lebih sering berupa penyesuaian daripada perubahan besar-besaran, dan selalu didasarkan pada riset yang mendalam dan kajian kebutuhan jangka panjang.

2. Apa yang membedakan pendekatan kurikulum di negara maju dengan Indonesia?

Pendekatan kurikulum di negara maju seperti Finlandia, Jepang, dan Singapura memiliki beberapa perbedaan mencolok dibandingkan dengan Indonesia, antara lain:

a. Stabilitas Kurikulum:

Salah satu perbedaan utama adalah stabilitas kurikulum. Di negara-negara maju, seperti Finlandia dan Jepang, kurikulum cenderung lebih stabil dan jarang mengalami perubahan besar-besaran. Mereka lebih fokus pada penyesuaian dan perbaikan bertahap berdasarkan evaluasi yang mendalam dan riset pendidikan yang komprehensif. Sebaliknya, Indonesia sering kali mengalami perubahan kurikulum yang signifikan setiap kali ada pergantian Menteri Pendidikan atau perubahan pemerintahan.

b. Pendekatan Berbasis Penelitian:

Negara-negara maju seperti Finlandia dan Singapura cenderung melakukan perubahan kurikulum yang berbasis **riset pendidikan** dan kajian panjang, sedangkan di Indonesia, perubahan kurikulum sering kali lebih dipengaruhi

oleh faktor politik dan administratif tanpa kajian yang cukup mendalam tentang dampaknya terhadap pembelajaran dan hasil pendidikan.

c. Otonomi dan Pemberdayaan Guru:

Di Finlandia, misalnya, kurikulum dirancang dengan memberikan otonomi kepada guru, yang dipercaya untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan kebutuhan siswa. Sementara di Indonesia, kurikulum sering kali lebih terpusat, dengan banyak pedoman yang ditentukan oleh pemerintah pusat, yang kadang mengurangi kebebasan sekolah dan guru dalam merancang proses belajar mengajar yang sesuai dengan kondisi lokal.

d. Pendekatan yang Berfokus pada Pengembangan Karakter:

Negara seperti Jepang sangat menekankan pendidikan karakter, dengan kurikulum yang mencakup pembelajaran moral dan nilai-nilai sosial. Di Indonesia, meskipun ada penekanan pada nilai-nilai karakter dalam kurikulum, penerapannya sering kali tidak konsisten dan kurang terintegrasi dengan baik dalam proses pembelajaran sehari-hari.

3. Mengapa mereka tidak melakukan perubahan besar-besaran secara rutin?

Negara-negara seperti Finlandia, Jepang, dan Singapura tidak melakukan perubahan besar-besaran secara rutin dalam kurikulum mereka karena beberapa alasan:

a. Pendekatan Berbasis Riset dan Evaluasi

Perubahan kurikulum di negara-negara ini dilakukan hanya setelah evaluasi yang teliti dan berbasis data yang mengidentifikasi kebutuhan nyata dari siswa dan dunia kerja. Mereka lebih mengutamakan penyesuaian bertahap dan perbaikan dalam sistem pendidikan yang sudah ada daripada melakukan perubahan radikal yang dapat menyebabkan kebingungan di kalangan guru dan siswa.

b. Fokus pada Keberlanjutan dan Konsisten

Negara-negara maju memahami pentingnya konsistensi dalam pendidikan untuk mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, mereka tidak terburu-buru dalam membuat perubahan besar pada kurikulum.

Mereka lebih memilih untuk mengadaptasi dan menyempurnakan kurikulum sesuai dengan perkembangan zaman daripada melakukan perubahan drastis yang tidak teruji.

c. Keterlibatan Semua Pemangku Kepentingan:

Di negara-negara maju, perubahan kurikulum biasanya melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua, dan dunia industri, untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan benar-benar relevan dengan kebutuhan pendidikan dan masyarakat. Hal ini memastikan bahwa perubahan kurikulum dilakukan dengan cara yang terencana dan mendalam, bukan hanya sebagai respons terhadap isu sementara.

Pendekatan kurikulum di negara-negara maju seperti Finlandia, Jepang, dan Singapura lebih stabil, berbasis riset, dan bertahap, berbeda dengan Indonesia yang sering mengalami perubahan kurikulum besar-besaran. Negara-negara tersebut tidak melakukan perubahan besar secara rutin karena mereka lebih menekankan evaluasi jangka panjang, penyesuaian yang berbasis bukti, dan keberlanjutan dalam sistem pendidikan mereka. Stabilitas kurikulum, otonomi guru, dan keterlibatan pemangku kepentingan menjadi kunci sukses dalam manajemen kurikulum di negara-negara maju.

4. Dampak Seringnya Perubahan Kurikulum

Dari sisi pendidikan, perubahan kurikulum yang terlalu sering cenderung merugikan siswa, meskipun ada niat baik untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Ada beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan:

1. Ketidakstabilan Pembelajaran:

Setiap perubahan kurikulum membawa perubahan besar dalam materi ajar, metode pengajaran, dan tujuan pembelajaran. Bagi siswa, perubahan yang terlalu sering membuat mereka kesulitan untuk mendalami materi yang mereka pelajari. Mereka mungkin merasa terganggu karena materi yang diajarkan berubah atau bahkan disesuaikan dengan standar baru yang belum sepenuhnya mereka pahami. Ini bisa menghambat pencapaian kompetensi dasar yang diperlukan.

2. Kesulitan dalam Menyesuaikan Diri

Siswa tidak hanya harus beradaptasi dengan materi pelajaran yang berubah, tetapi juga dengan cara mengajar yang baru. Ini bisa membingungkan mereka, karena pengajaran yang efektif biasanya memerlukan waktu untuk menguasai metode dan pendekatannya. Pergeseran yang terus-menerus dalam kurikulum juga bisa mengganggu proses pembelajaran berkelanjutan, sehingga siswa tidak dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang subjek.

3. Keterlambatan dalam Menyerap Keterampilan yang Dibutuhkan

Perubahan kurikulum yang terlalu sering juga bisa menyebabkan keterlambatan dalam pengembangan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Jika kurikulum terus-menerus berubah tanpa adanya evaluasi yang matang terhadap kebutuhan pasar, siswa mungkin tidak memperoleh keterampilan yang relevan dan up-to-date yang dibutuhkan untuk masa depan mereka.

5. Dari sisi praktisi, bagaimana guru dan sekolah merespon perubahan yang tidak konsisten?

Bagi guru dan sekolah, perubahan kurikulum yang tidak konsisten seringkali menciptakan tantangan besar dalam hal implementasi dan adaptasi. Ada beberapa cara mereka merespons perubahan tersebut:

a. Kebingungan dan Ketidaksiapan

Guru sering kali merasa kebingungan dengan perubahan kurikulum yang terus-menerus, karena mereka tidak diberikan cukup waktu untuk memahami dan menguasai kurikulum yang baru. Selain itu, mereka harus menyesuaikan metode pengajaran, materi, dan evaluasi dalam waktu yang sangat singkat. Tanpa pelatihan yang memadai, hal ini dapat mengurangi efektivitas pengajaran dan membuat proses pembelajaran menjadi kurang optimal.

b. Beban Kerja yang Meningkat

Guru dihadapkan pada beban kerja tambahan karena harus melakukan penyesuaian materi dan metode ajar. Mereka tidak hanya harus

mempersiapkan bahan ajar sesuai dengan kurikulum baru, tetapi juga berusaha untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa yang berbeda. Jika perubahan tersebut tidak didukung oleh sumber daya yang cukup, seperti pelatihan dan materi ajar yang sesuai, ini bisa memperburuk kesejahteraan mental guru dan mengurangi motivasi mereka.

c. Penolakan dan Ketidakpuasan

Guru dan sekolah sering kali merasa frustrasi ketika perubahan yang tidak konsisten ini tidak disertai dengan kebijakan yang jelas atau penjelasan yang memadai. Sebagian besar praktisi merasa bahwa perubahan ini lebih didorong oleh faktor politik dan administrasi ketimbang kebutuhan nyata di lapangan. Ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan guru, yang pada gilirannya dapat berdampak pada semangat kerja dan kepuasan mereka dalam profesinya.

6. Dari sisi evaluasi kebijakan, apakah perubahan kurikulum di Indonesia selalu didasarkan pada data yang valid dan riset yang mendalam?

Secara umum, perubahan kurikulum di Indonesia sering kali tidak didasarkan pada data yang valid dan riset yang mendalam. Meskipun ada upaya untuk membuat perubahan berbasis penelitian, dalam praktiknya, kebijakan pendidikan sering kali lebih dipengaruhi oleh dinamika politik dan keputusan administratif, daripada berdasarkan pada analisis data pendidikan yang komprehensif. Beberapa alasan mengapa hal ini terjadi antara lain:

a. Kurangnya Evaluasi Menyeluruh

Perubahan kurikulum di Indonesia sering kali tidak disertai dengan evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum yang ada sebelumnya. Banyak perubahan yang dilakukan tanpa melakukan analisis kebutuhan yang jelas dan pemetaan masalah yang mendalam. Proses pengambilan keputusan sering kali tidak melibatkan data yang memadai tentang dampak kurikulum terhadap hasil pendidikan dan perkembangan siswa di lapangan.

b. Pendekatan Top-Down

Di Indonesia, perubahan kurikulum cenderung **terpusat** pada tingkat pusat dan kurang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat bawah, seperti guru dan kepala sekolah, dalam proses perencanaan dan evaluasi. Hal ini mengarah pada ketidaksesuaian antara kurikulum yang diusulkan dan kondisi riil di lapangan. Sebagai contoh, kurikulum baru sering kali tidak mempertimbangkan kapasitas sekolah di daerah terpencil atau keterbatasan guru dalam mengimplementasikan perubahan tersebut.

c. Terlalu Cepat Mengambil Keputusan

Keputusan untuk merombak kurikulum sering kali diambil tanpa melakukan riset mendalam terlebih dahulu tentang keberhasilan atau kegagalan kurikulum sebelumnya. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan praktisi pendidikan serta siswa, karena perubahan dilakukan tanpa memberikan waktu yang cukup untuk mengevaluasi dampak kebijakan pendidikan yang ada sebelumnya.

7. Bagaimana Indonesia bisa mengambil pelajaran dari negara-negara maju dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum yang lebih stabil?

Indonesia dapat mengambil beberapa pelajaran penting dari negara-negara maju seperti **Finlandia, Jepang, dan Singapura** dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum yang lebih stabil dan efektif. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil:

1. Pendekatan Bertahap dan Berkelanjutan (Incremental Approach)

Salah satu hal yang dapat dipelajari dari negara-negara maju adalah pentingnya pendekatan bertahap dalam merancang kurikulum. Finlandia, Jepang, dan Singapura cenderung mengutamakan perbaikan bertahap alih-alih perubahan radikal. Indonesia bisa mengadopsi pendekatan ini dengan melakukan penyesuaian kurikulum secara terencana dan tidak terburu-buru. Penyesuaian ini harus didasarkan pada hasil evaluasi yang mendalam mengenai implementasi kurikulum yang ada, dan disesuaikan dengan perkembangan dunia pendidikan serta kebutuhan siswa dan industri.

2. Pemberdayaan Guru dan Otonomi Sekolah

Negara-negara maju memberikan otonomi yang lebih besar kepada guru dan sekolah dalam pengelolaan kurikulum, yang memungkinkan mereka untuk lebih fleksibel dan terlibat dalam proses perubahan kurikulum. Indonesia bisa belajar dari pendekatan ini dengan memberi lebih banyak kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan materi ajar dengan konteks lokal, asalkan tetap memenuhi standar pendidikan nasional. Selain itu, meningkatkan pelatihan profesional untuk guru agar mereka siap menghadapi perubahan dan bisa beradaptasi dengan kurikulum yang ada adalah langkah yang sangat penting.

3. Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Keterampilan Abad 21

Negara-negara maju seperti Singapura sangat fokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21, yang tidak hanya mencakup pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan sosial, komunikasi, berpikir kritis, dan teknologi. Indonesia perlu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan global yang terus berkembang, dengan mengintegrasikan teknologi dan keterampilan digital dalam kurikulum, serta memperkuat pembelajaran berbasis proyek yang lebih relevan dengan tantangan dunia kerja.

- **Pendekatan Berbasis Riset**

Negara-negara maju melakukan penelitian yang mendalam sebelum membuat perubahan besar pada kurikulum. Indonesia harus lebih sering melibatkan penelitian berbasis data dan evaluasi jangka panjang terhadap dampak perubahan kurikulum. Dengan melibatkan pakar pendidikan dan para peneliti dalam proses perubahan, Indonesia dapat memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya berdasarkan pada keputusan politik atau administrasi, tetapi benar-benar didorong oleh bukti yang valid.

8.. Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan perubahan kurikulum yang lebih terencana, berbasis data, dan melibatkan banyak pihak?

Untuk memastikan bahwa perubahan kurikulum di Indonesia lebih terencana, berbasis data, dan melibatkan banyak pihak, langkah-langkah berikut dapat diambil:

a. Evaluasi Mendalam terhadap Kurikulum yang Ada

Sebelum melakukan perubahan besar, Indonesia perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum yang sudah diterapkan. Ini meliputi analisis dampak kurikulum terhadap kualitas pembelajaran, pencapaian kompetensi siswa, dan kesiapan dunia kerja. Evaluasi ini harus berbasis pada data yang valid dan dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang untuk melihat dampak perubahan tersebut.

b. Proses Perencanaan yang Inklusif

Perencanaan kurikulum perlu melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk guru, kepala sekolah, orang tua, pakar pendidikan, serta perwakilan dari dunia industri dan dunia kerja. Dengan mengajak semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, Indonesia dapat memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan benar-benar mencerminkan kebutuhan seluruh masyarakat dan dunia kerja. Dialog sosial yang melibatkan pemangku kepentingan ini akan memastikan bahwa kurikulum dapat diterima dan diimplementasikan dengan lebih efektif.

c. Pendidikan Berbasis Riset dan Data

Setiap perubahan kurikulum harus didorong oleh riset dan evaluasi berbasis data. Indonesia perlu membangun sistem riset pendidikan yang dapat mengumpulkan dan menganalisis data mengenai efektivitas kurikulum secara teratur. Penelitian longitudinal yang melibatkan data dari berbagai tingkat pendidikan akan membantu dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi. Ini juga akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kesenjangan antara kurikulum yang ada dan hasil yang diinginkan.

d. Pelatihan dan Dukungan untuk Guru

Agar perubahan kurikulum dapat diimplementasikan dengan baik, guru harus dipersiapkan dengan pelatihan yang memadai dan

berkelanjutan. Pelatihan ini harus mencakup penguasaan materi ajar baru, pemahaman terhadap metode pengajaran inovatif, serta penggunaan teknologi dalam pendidikan. Indonesia juga perlu menyediakan sumber daya tambahan untuk membantu guru mengadaptasi perubahan dengan cara yang tidak membebani mereka.

e. Pengawasan dan Umpan Balik Berkelanjutan

Pengawasan terhadap implementasi kurikulum yang baru harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan benar-benar membawa dampak positif. Selain itu, mekanisme umpan balik dari guru, siswa, dan orang tua harus dibangun untuk terus memperbaiki kurikulum berdasarkan pengalaman nyata di lapangan. Indonesia perlu memiliki sistem evaluasi yang fleksibel untuk menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

f. Mengurangi Pengaruh Politik dalam Perubahan Kurikulum

Agar perubahan kurikulum lebih stabil dan berkelanjutan, perlu ada upaya untuk meminimalkan pengaruh politik dalam proses perubahan kurikulum. Kebijakan pendidikan harus didasarkan pada prinsip kompetensi, riset, dan kebutuhan pendidikan jangka panjang, bukan sekadar keputusan politis yang dipengaruhi oleh pergantian pemerintahan. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan memperkuat independensi lembaga pendidikan dan memastikan bahwa kebijakan pendidikan dibuat oleh tim ahli yang berbasis pada bukti ilmiah dan data yang valid.

KESIMPULAN

Untuk mengelola kurikulum yang lebih stabil dan efektif, Indonesia harus belajar dari negara-negara maju dengan mengutamakan pendekatan yang berkelanjutan, berbasis riset, dan terencana. Dengan memperkuat evaluasi kebijakan, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan memastikan pelatihan yang memadai untuk guru, Indonesia dapat menciptakan perubahan kurikulum

yang lebih stabil dan relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, untuk memastikan keberhasilan implementasi, Indonesia harus meminimalkan pengaruh politik dalam kebijakan pendidikan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih berbasis bukti.

Sebagai negara dengan tantangan besar dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman, Indonesia dihadapkan pada dilema antara melakukan perubahan kurikulum secara cepat atau mempertahankan stabilitas yang lebih berkelanjutan. Meskipun perubahan kurikulum sering kali dilakukan dengan niat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, perubahan yang terlalu sering tanpa evaluasi yang mendalam justru dapat menghambat proses pembelajaran dan membebani para praktisi pendidikan.

Daftar Pustaka

- Amirrachman, A., Syafi'i, S., & Welch, A. (2008). Decentralization and education in Indonesia: The promise and challenges of school-based management. *Asia Pacific Journal of Education*, 28(4), 463–475.
<https://doi.org/10.1080/02188790802469065>
- Arends, R. I. (2012). *Learning to Teach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Darling-Hammond, L. (2010).** *The Flat World and Education: How America's Commitment to Equity Will Determine Our Future*. New York: Teachers College Press..
- Depdikbud. (2013). *Kurikulum 2013: Pedoman Implementasi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012).** *Professional Capital: Transforming Teaching in Every School*. New York: Teachers College Press.
- Kemendikbudristek. (2021). *Kurikulum Merdeka untuk Pendidikan Berkualitas*. Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id>
- Mourshed, M., Chijioke, C., & Barber, M. (2010).** *How the World's Most Improved School Systems Keep Getting Better*. McKinsey & Company.
- OECD. (2019). *Future of Education and Skills 2030: Conceptual Learning Framework*. OECD Publishing.
- Rahayu, S. (2020).** "Dinamika Perubahan Kurikulum di Indonesia: Implikasi terhadap Implementasi Pembelajaran," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25(1), 112-125.
- Sahlberg, P. (2011).** *Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?* New York: Teachers College Press.
- Sahlberg, P. (2011).** *Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?* New York: Teachers College Press.

- Sukmadinata, N. S. (2011).** *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Timmerman, A., & Korthagen, F. (2015).** "Policy and Practice in Curriculum Reform: Analyzing the Relationship between Teacher Education and Curriculum Change," *Journal of Curriculum Studies*, 47(1), 43-68.
- Toh, S. C. (2018).** "Singapore's Education System: Challenges and Reform," *Asia Pacific Education Review*, 19(3), 383-395.
- UNESCO. (2015). *Education for All 2000–2015: Achievements and Challenges*. Paris: UNESCO Publishing.
- World Bank. (2020). *Improving Education Quality in Indonesia: Challenges and Strategies*. Washington, D.C.: World Bank.
- Yuliana, I., & Widiastuti, E. (2020). Implementation of the 2013 curriculum in improving the quality of education in Indonesia. *Journal of Education and Practice*, 11(1), 78–86.